



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Gambar 1.1

Kedudukan Rencana Kinerja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik



Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya

diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan antasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informasi dan hubungan masyarakat; Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi; pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, diseminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat; melaksanakan pelayanan teknis administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditetapkannya Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung

Kepegawaian

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 61 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 61 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 12 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang serta pelaksana sebanyak 41 orang.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT				12		12
5	Sekretaris UPT				2		2
6	Staf					41	41
	JUMLAH		1	5	14	41	61

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		3	1					4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT		2	9	1				12
5	Sekretaris UPT		1	1					2
6	Staf		5	16	4	14	1	1	41
	JUMLAH		13	27	5	14	1	1	61
	%		21,67%	44,27%	8,33%	23,33%	1,67%	1,67%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 13 orang (21,67%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang dan 2 orang Kepala Seksi dan 5 staf, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 27 orang (44,27%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 5 orang (8,33%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 14 orang (23,33%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,67%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,67%).

Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan

salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Tabel 1.3
Realisasi Keuangan Tahun 2015

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	3.200.000.000	-	-
Retribusi Daerah	3.200.000.000	-	-
Belanja	53.063.861.335	47.260.280.901	89,07%
- Belanja Tidak Langsung	5.759.688.833	5.424.333.631	94,18%
- Belanja Langsung			
Belanja pegawai	3.345.350.000	3.021.304.000	90,32%
Belanja barang dan jasa	33.919.687.502	30.502.585.858	89,93%
Belanja modal	10.039.135.000	8.312.057.412	82,80%

Sumber : SIMDA Pemerintah Kota Bandung

Realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selama tahun anggaran 2015 untuk belanja dari anggaran sebesar Rp. 53.063.861.335,- terealisasi sebesar Rp. 47.260.280.901,- (89,07%), yang terdiri dari belanja tidak langsung dari anggaran sebesar Rp. 5.759.688.833,- terealisasi sebesar Rp. 5.424.333.631,- (94,18%).

Realisasi belanja langsung dari terdiri dari belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp. 3.345.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.021.304.000,- (90,32%), Belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar Rp. 33.919.687.502,- terealisasi sebesar Rp. 30.502.585.858,- (89,93%) dan belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 10.039.135.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.312.057.412,- (82,80%).

Sedangkan untuk realisasi target dari retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp. 3.200.000.000,- tidak terpungut, dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-XI/2014 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No.S-349/PK/2015 Tanggal 29 Juni 2015; Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. Dari dasar tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memungut retribusi menara telekomunikasi dengan dasar NJOP sebesar 2 %, untuk itu Diskominfo sedang merevisi Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusi p[engendalian menara telekomunikasi, sebagai dasar perhitungan retribusi berdasarkan RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi).

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan impelmentasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan

mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan melalui visinya memantapkan **“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;
- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya;
- Sejahtera** : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur.

Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menjembatani memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

- Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 13. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;
 14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 17. Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung
 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017 adalah :

- 1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017.
- 2) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017 disusun mengacu pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.
<i>BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015</i>	Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
<i>BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</i>	Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan
<i>BAB IV Penutup</i>	Berisi kesimpulan dari rencana kinerja tahunan
<i>Lampiran</i>	Berisi lampiran Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017, dan lampiran lainnya



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 dan Capaian Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Tahun 2015 telah melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib Yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi. Terhadap urusan tersebut akan evaluasi sebagai berikut;

Urusan Wajib

I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi sebanyak 96 kali;

- Keluaran ; 1. SMS Gateway
- 2. E-Mail
- 3. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

-Hasil : Memberikan kepuasan kepada masyarakat mengenai pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung.

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi;

- Keluaran ; 1. Peliputan (press release)
- 2. Cetakan buku
- 3. Bandung Menjawab
- Hasil ; Memberikan informasi program Pemerintah Kota Bandung.

3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi, dari target 2 paket kegiatan terealisasi 2 paket kegiatan;

- Keluaran : 1. Tersedianya alat-alat studio AM
- 2. Tersedianya alat-lat studio FM

- Hasil : Kelancaran kegiatan penyiaran Radio Sonata AM/FM dalam menyampaikan sosialisasi program Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat.
4. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
- Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, memiliki target 3 paket kegiatan dan terealisasi 3 paket kegiatan.
- Keluaran : Aplikasi Bandung Commad Center dan Sewa Bandwidth dan Leased Line www.bandung.go.id
 - Hasil : Aplikasi Bandung Commad Center dan Tersedianya Bandwidth dan hosting www.bandung.go.id
5. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
- Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi, memiliki target 5 paket kegiatan dan terealisasi 5 paket kegiatan.
- Keluaran : Pemeliharaan jaringan dan tower
 - Hasil : Terpeliharanya jaringan dan tower
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, memiliki target 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 Dokumen kegiatan.
- Keluaran : Tersedianya Perda telekomunikasi
 - Hasil : Kajian Perda dan Cell Plan
7. Pengelolaan Bandung Command Center
- Keluaran : Pemeliharaan dan operasional Bandung Command Center
 - Hasil : Terpusatnya informasi melalui BCC sebagai bahan masukan bagi pimpinan
8. Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik
- Keluaran : Operasional Radio Sonata
 - Hasil : Tersalurkannya informasi program Pemkot Bandung melalui siaran radio dan siaran keliling

II Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Meliputi kegiatan;

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

- Keluaran : Pelatihan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- Hasil : Tersedianya SDM di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

III. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Melalui kegiatan;

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Keluaran : a. Pembuatan cenderamata
b. Pembuatan kalender
c. Sosialisasi media cetak
d. Sosialisasi media elektronik
- Hasil : Masyarakat mengetahui informasi pembangunan Pemerintah Kota Bandung

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Keluaran : a. Majalah Swara Bina Kota
b. CD Swara Bina Kota
c. Tabloid Swara Bina Kota
- Hasil : Tersebar nya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

- Keluaran : a. Dialog Interaktif TV
b. Dialog Interaktif radio
c. Fragmen/pemberitaan
d. Running teks
e. Iklan Layanan Masyarakat
- Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program Pemerintah Kota Bandung

4. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan.

- Keluaran : 1. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
2. Sosialisasi melalui megatron
3. Sosialisasi melalui tatap muka
- Hasil : Pemahaman masyarakat tentang kebijakan pelayanan perijinan menara telekomunikasi

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

Table. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 (n3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2014 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun 2015(n-1)	Realisasi Renja SKPD tahun 2015 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11			
25													
25	1.25.01	15											
25	1.25.01	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pengaduan masyarakat , LAPOR dan SMS gateway	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	100%	96 kali	96 kali	100%
25	1.25.01	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Maintenance alat-alat studio radio Sonata FM dan AM serta sosialisasi program	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
25	1.25.01	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Sewa Bandwith dan Collocation	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
25	1..2.5.01	15	07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Maintenance Tower Maintenance hardware Pengembangan Web.Bandung.go.id	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
25	1..2.5.01	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Data Base Jastel dan alat deteksi	1 dokumen	1 dokumen	2	2	100%	3	3 dokumen	100%

								dokumen	dokumen		dokumen		
25	1..2.5.01	15	09	Pengelolaan Bandung Command Center	Operasional Bandung Command Center dan pemeliharaan peralatan	-	-	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
25	1..2.5.01	15	11	Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik	Operasional radio sonata dan siaran keliling dan sarling	-	-	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
25	1..2.5.01	08		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi									
25	1..2.5.01	08	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan bidang komunikasi dan informasi	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	7 pelatihan	7 pelatihan	100%
25	1..2.5.01	18		Program kerjasama informasi dengan mas media									
25	1..2.5.01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Sosialisasi melalui media cetak dan onliine	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
25	1..2.5.01	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui radio dan penerbitan Majalah dan tabloid Swara Bina Kota	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
25	1..2.5.01	18	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Sosialisasi melalui dialog interaktif di media elektronik (TV dan radio)	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
25	1..2.5.01	18	04	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	Sosialisasi tata cara perijinan menara telekomunikasi dalam bentuk tatap muka dan media cetak dan elektronik	-	-	3 paket	3 paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung ditetapkan kedudukan unit kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

Kedudukan Unit Kerja

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah instansi pelaksana Pemerintah Kota Bandung di Bidang Komunikasi dan Informasi
- b. Taktis operasional dan teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
- c. Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok di dalam melaksanakan sebagian kewenangan di bidang komunikasi dan informasi

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
- b. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi ; Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, dan Bidang Hubungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Analisis kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil.

Setiap kegiatan dinilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerjanya seperti disajikan pada tabel 2.2. Hasil pengukuran capaian kinerja indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan.

A. Program: Pengembangan Komunikasi dan Media Massa

Dalam program tersebut dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan masukan input dana dan keluaran atau hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 1.060.000.000,- terealisasi Rp. 999.712.241,- (94,31%) menghasilkan output :
 - a. Terjawabnya SMS gateway
 - b. Media cetak
 - c. Pengaduan publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

2. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input dana sebesar Rp. 950.000.000,- terealisasi Rp. 945.629.000,- (99,54%), menghasilkan output;

- a. Tersedianya alat studio Sonata FM/AM
- b. Terpenuhinya honor penyiar

3. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Jaringan.

Input dana yang digunakan Sebesar Rp. 2.190.050.000,- teresalisasi Rp. 1.999.623.700,- (91,30%). Menghasilkan Output ;

- a. Tersedianya bandwidth
- b. Tersedianya hosting www.bandung.go.id

4. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sebesar Rp. 26.080.950.000,- terealisasi Rp. 25.482.012.160,- (97,70%) menghasilkan output;

- a. Terlaksananya pemeliharaan tower dan jaringan antar SKPD
- b. Tersedianya Hardware dan software aplikasi Bandung Comman Center (BCC)

5. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sebesar Rp. 575.000.000,- terealisasi Rp. 568.701.400,- (98,90%), menghasilkan output;

- Terdatanya jasa postel di Kota Bandung dan 3 dokumen

B. Program : Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Untuk mencapai sasaran program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut, yaitu:

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Kegiatan Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	4 paket	4 paket	100%
	- Bimtek bidang IT di Ruang Pelatihan Colombus ITB			
	- Bintek supermarket sampah di Kecamatan Bandung Wetan			
	- Bintek Kehumasan; Worshop Bakohumas di Hotel Haris Bandung			
	- Saresehan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Cimencrang			

Dengan input dana dan hasil yang dicapai, yaitu:

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Input dana yang digunakan sebesar Rp. 370.000.000,- terealisasi Rp. 368.177.000,- (99,51 %), menghasilkan output;

- Terlatihnya bidang komunikasi dan informasi sebanyak 4 paket kegiatan, yaitu;
 - a. Bimtek bidang IT di Ruang Pelatihan Colombus ITB sebanyak 96 terdiri dari 4 angkatan masing-masing 24 orang.
 - b. Bimtek supermarket sampah di Kecamatan Bandung Wetan sebanyak 30 Orang
 - c. Bintek Kehumasan; Worshop Bakohumas di Hotel Haris Bandung sebanyak 54 Orang
 - d. Saresehan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Cimencrang sebanyak 151 Orang

C. Program : Kerjasama Informasi dengan media massa.

Dengan input dana dan hasil yang dikeluarkan oleh kegiatan, yaitu;

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

- Input dana yang digunakan sebesar Rp. 1.526.900.000.- terealisasi Rp. 1.523.628.790,- (99,79%),

b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Input dana yang digunakan sebesar Rp. 1.075.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.062.636.700,- (98,85%),

c. Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

- Input dana yang digunakan sebesar Rp. 1.33.500.000.- terealisasi Rp. 1.324.475.670.- (99,21%)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015 (Thn n-2)	Tahun 2016 (Thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2015 (thn n+1)	Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK			100%	100%	50%	75%	100%	100%	50%	75%	
	Sewa Bandwith dan Collocation, penyusunan Rencana Detail TIK dan CCTV internal			2 paket	2 paket	Seluruh kecamatan dan SKPD	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW serta Rencana Detail TIK	2 paket	2 paket	Seluruh kecamatan dan SKPD	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW serta Rencana Detail TIK	
	Maintenance Tower Maintenance hardware Pengembangan Web.Bandung.			2 paket	1 paket	Pembuatan spftware dan hardware	Pengelolaan dan penyempurnaan operationa	2 paket	2 paket	Pembuatan spftware dan hardware	Pengelolaan dan penyempurnaan operationa	

	go.id dan BCC					operationa l room	l room			operationa l room	l room	
2	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK					100%	100%			100%	100%	
	masyarakat, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan SMS gateway			96 kali	96 kali	Setiap hari	Setiap hari	96 kali	96 kali	Setiap hari	Setiap hari	
3	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan					B	B			B	B	
	Tesusunnya IKM dinas					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan					C	C			C	C	
	Tersusunnya Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)											
5	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%			100%	100%	
	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%			100%	100%	
	Tersusunnya tertib administrasi barang/asset daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	SPM KOMINFO Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010	Indeks Kinerja Kunci (IKK) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 Tanggal 2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pelayanan					1 paket	1 paket			1 paket	1 paket	

	komunikasi dan Informasi bagi media massa											
	Maintenance alat-alat studio radio Sonata FM dan AM serta sosialisasi program			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
	Tersusunnya Data Base Jastel dan alat deteksi			2 Dokumen	3 Dokumen	1 paket	1 paket	2 Dokumen	3 Dokumen	1 paket	1 paket	
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat			7 Pelatihan	4 Pelatihan	3 Paket	3 Paket	4 Pelatihan	4 Pelatihan	3 Paket	3 Paket	
	Pelatihan bidang komunikasi dan informasi			7 Pelatihan	4 Pelatihan	3 Paket	3 Paket	7 Pelatihan	4 Pelatihan	3 Paket	3 Paket	
	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi											
	Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;											

	pembuatan CD/VCD Program Pemerintah Kota Bandung			1 judul		1 Judul	1 Judul	1 judul		1 Judul	1 Judul	
	Pembuatan cenderamata			150 buah	150 buah	160 buah	150 buah	150 buah	150 buah	160 buah	150 buah	
	Pembuatan cetak kalender			1.700 eks	1700 eks.	1.800 eks.	1.700 eks.	1.700 eks	1700 eks.	1.800 eks.	1.700 eks.	
	Sosialisasi media cetak			2 paket	8 paket	80 kali	75 kali	2 paket	8 paket	80 kali	75 kali	
	Sosialisasi media elektronik			15 paket	24 paket	273 kali	249 kali	15 paket	24 paket	273 kali	249 kali	
	Tersampainya informasi melalui Swara Bina Kota;											
	Majalah Swara Bina Kota			17.000 eks	6 edisi	6 edisi	6 edisi	17.000 eks	6 edisi	6 edisi	6 edisi	
	CD Swara Bina Kota			8.400 buah	6 edisi	6 edisi	6 edisi	8.400 buah	6 edisi	6 edisi	6 edisi	
	Tabloid			3 edisi/220 eks	3 edisi	6 edisi	6 edisi	3 edisi/220 eks	3 edisi	6 edisi	6 edisi	
	Cetakan lainnya			3 paket				3 paket				
	Tersosialisasinya program Pemkot melalui;											
	Dialog interaktif TV			23 kali	37 kali	50 kali	60 kali	23 kali	37 kali	50 kali	60 kali	
	Dialog interaktif radio			19 kali	20 kali	35 kali	38 kali	19 kali	20 kali	35 kali	38 kali	
	Fragmen/pemberitaan			5 kali	53kali	5 kali	5 kali	5 kali	53kali	5 kali	5 kali	
	Running teks			70 kali	100 kali	125 kali	137 kali	70 kali	100 kali	125 kali	137 kali	

	Iklan Layanan Masyarakat			75 kali	130 kali	140 kali	154 kali	75 kali	130 kali	140 kali	154 kali	
	Radio Spot			30 kali	60 kali	75 kali	82 kali	30 kali	60 kali	75 kali	82 kali	
	Media cetak				4 kali							
	Siaran Keliling				18 kali	30 kali	30 kali			30 kali	30 kali	
	Wawar Keliling					12 kali	12 kali			12 kali	12 kali	
	Pameran					2 kali	2 kali			2 kali	2 kali	
	Pertunjukan Rakyat					12 kali	12 kali			12 kali	12 kali	
	Pemberitaan hari-hari besar nasional dan kegiatan lainnya.					12 kali	12 kali			12 kali	12 kali	
	Pemutaran film					12 kali	12 kali			12 kali	12 kali	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan berdasarkan pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Bandung.

Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- **Tujuan** : Terlaksananya Reformasi Birokrasi
- **Sasaran** :
 1. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government
 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Indikator sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan
2. Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line

3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Nilai evaluasi LAKIP
5. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti
6. Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah
7. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan SKPD, yaitu;

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-gornment	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area public menuju <i>cyber city</i> dan tersedianya pasif infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informatika.
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan public	Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi	Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan

2.3.1 Analisis Strategi

Pendekatan analisis SWOT (*Strenght, Weekness, Opportunity, Threats*) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan dasar sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

<p style="text-align: center;">ALI</p> <p style="text-align: center;">ALE</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan/Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber daya aparatur yang memadai Kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi. 	<p style="text-align: center;">kelemahan/Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> Mekanisme SOP belum tersedia Kinerja pelayanan publik belum memuaskan Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
<p style="text-align: center;">Peluang/Oportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> Aksesibilitas tol cipularang dengan ibu kota negara Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian Pengembangan kota jasa yang profesional Pusat pendidikan, perekonomian dan perdaganganyang luas Adanya pelimpahan urusan /kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas Optimalisasi penggunaan teknologi system informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang bermartabat. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa yang profesional. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
<p style="text-align: center;">Ancaman/Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok. Krisis keuangan global. Populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. Perbankan belum menjamin alokasi dana pada sektor riil dan sektor UKM. Penurunan luas lahan terbuka hijau. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan 	<p style="text-align: center;">Strategi (W - T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbaikan manajemen layanan publik berbasis <i>reinventing government</i> Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. *Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)*

- a. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan kota jasa yang bermartabat
- c. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- d. Leadership Kepala Daerah yang kapabel dan aspiratif mendorong pengembangan kota jasa bermartabat yang profesional.

2. *Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)*

- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM .
- b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.

3. *Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)*

- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
2. Meningkatkan integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

Atas dasar tersebut maka faktor kunci keberhasilan adalah :

untuk mewujudkan pusat pelayanan Informasi menuju kota Bandung sebagai kota jasa yang Bermartabat diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Diskominfo dan seluruh untuk merealisasi komitmen tersebut maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilannya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

1. Kemitraan yang kuat dari seluruh aparaturnya Diskominfo untuk membangun kualitas pusat pelayanan Informasi.
2. Kerjasama yang harmonis dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Bandung dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat. Adanya penyebaran Informasi guna mempertebal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio dan TV) sebagai media Komunikasi dan publikasi sehingga dapat mempercepat sosialisasi program/kebijakan Pemerintah Kota.
4. Tersedianya kualitas SDM di bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan pegawai dalam diklat.
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat

2.3.2 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan RENJA SKPD. Rancangan Renja SKPD merupakan kebijakan Top Down Planning yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan Up Down Planning yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga SKPD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas. Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2009 usulan hasil Musrenbang dan reses Dewan harus bisa diakomodir minimal sebesar 30 %.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Bandung	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK	58% %	49.577.600.085	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Bandung	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK		54.535.360.093	
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		Jumlah Application Programming Interface (API) dan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan	2 paket	923,019,650	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		Jumlah Application Programming Interface (API) dan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan	Setiap hari	1.015.321.615	
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		Terpeliharanya peralatan komunikasi, pengamanan data dan sistem informasi serta tersedianya alat komunikasi	3 paket	1,309,202,505	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		Terpeliharanya peralatan komunikasi, pengamanan data dan sistem informasi serta tersedianya alat komunikasi	3 paket	1.440.122.755	
3	Pengadaan alat studio dan komunikasi		Maintenance alat-alat studio radio Sonata FM dan AM serta sosialisasi program	3 paket	416.884.270	Pengadaan alat studio dan komunikasi		Maintenance alat-alat studio radio Sonata FM dan AM serta sosialisasi program	3 paket	458.572.697	

4	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		Sewa Bandwith10 Mbps Collocation 512 KBPS, penyusunan Rencana Detail TIK dan CCTV internal	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW serta Rencana Detail TIK	7,168,023,940	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		Sewa Bandwith10 Mbps Collocation 512 KBPS, penyusunan Rencana Detail TIK dan CCTV internal	Seluruh kecamatan, SKPD dan RW serta Rencana Detail TIK	7.884.826.334	
5	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		Integrasi aplikasi	7 Aplikasi	1.421.244.520	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		Integrasi aplikasi	7 Aplikasi	1.563.368.972	
6	Pengelolaan Bandung Command Center		Operasional Bandung Command Center dan Onboard GPS	2 paket	5.394.475.265	Pengelolaan Bandung Command Center		Operasional Bandung Command Center dan Onboard GPS	2 paket	8.849.641.350	
7	Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik		Operasional Radio Sonata	3 Paket	1.428.991.960	Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik		Operasional Radio Sonata	2 Paket	1.571.891.156	
8	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan kebijakan pos dan telekomunikasi		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK	2 Paket	5,570,488,000	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan kebijakan pos dan telekomunikasi		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK	2 Paket	6.127.536.800	
9	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	2 paket	2,932,407,355	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	2 paket	3.225.648.090	
10	Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi		FDG, Tata Kelola TIK, lokakarya smart city dan star up (perusahaan rintisan)	2 paket	4,901,155,600	Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi		FDG, Tata Kelola TIK, lokakarya smart city dan star up (perusahaan rintisan)	2 paket	5.391.271.160	
11	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik		Pengembangan utilitas publik	1 paket	14,796,067,300	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik		Pengembangan utilitas publik	1 paket	16.275.674.030	

12	Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi		Tersedianya Perwal data, Tata Kelola TIK, SOP Evaluasi dan pengembangan TIK	4 dokumen	1,635,639,720	Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi		Tersedianya Perwal data, Tata Kelola TIK, SOP Evaluasi dan pengembangan TIK	4 dokumen	1.799.203.692	
II	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	3 paket	4,191,265,000	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	3 paket	4.610.391.500	
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Pelatihan bidang komunikasi dan informasi	3 paket	4,191,265,000	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Pelatihan bidang komunikasi dan informasi	3 paket	4.610.391.500	
III	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tingkat validitas data yang tersedia	100%	3.543.935.125	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tingkat validitas data yang tersedia		3.898.328.637	
1	Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung		Pengembangan portal data	5 paket	424,096,750	Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung		Pengembangan portal data	5 paket	466.506.425	
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		Survei indeks kebahagiaan, survai indeks kepuasan, integrasi data, sosialisasi open data dan operasional sistem data base statistik Kota Bandung	5 paket	3,119,838,375	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah		Survei indeks kebahagiaan, survai indeks kepuasan, integrasi data, sosialisasi open data dan operasional sistem data base statistik Kota Bandung	5 paket	3.431.822.212	
IV	Program Pengembangan Data/Informasi		Tingkat keamanan dan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	1,402,803,895	Program Pengembangan Data/Informasi		Tingkat keamanan dan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan	100%	1,543.084.284	

1	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		Analisis pembangunan manusia, data basis pembangunan daerah dan pengembangan open data	3 paket	1,402,803,895	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		Analisis pembangunan manusia, data basis pembangunan daerah dan pengembangan open data	3 paket	1,543.084.284	
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	3.506.666.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	3.857.333.150	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	150.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	165.000.000	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	946,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	33 Kendaraan	1.040.600.000	
3	Penyediaan alat tulis kantor		Penyediaan Alat tulis kantor	2 paket	212,916,500	Penyediaan alat tulis kantor		Penyediaan Alat tulis kantor	2 paket	234.208.150	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Pengadaan barang cetakan dinas	3 paket	220,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Pengadaan barang cetakan dinas	3 paket	242.000.000	
5	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Alat-alat rumah tangga	3 Paket	805,750,000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Alat-alat rumah tangga	3 Paket	886.325.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan koran, majalah dan tabloid	12 bulan	50.000.0000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan koran, majalah dan tabloid	12 bulan	550.000.000	
7	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman	12 bulan	462,000,000	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman	12 bulan	508.200.000	
8	Rapat-rapat		terlaksananya	12 bulan	440,000,000	Rapat-rapat		terlaksananya	12 bulan	484.000.000	

	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Te knis Perkantoran		Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 bulan	220,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Te knis Perkantoran		Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 bulan	242.000.000	
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.323.612.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.555.973.750	
1	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur		Perlengkapan kantor	3 Paket	732,600,000	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur		Perlengkapan kantor	3 Paket	805.860.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung	1 paket	1.371.012.500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung	1 paket	1.508.113.750	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor		Pemeliharaan alat kantor	1 paket	220,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor		Pemeliharaan alat kantor	1 paket	242.000.000	
VI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur	100%	275.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur	100%	305,500,000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Pakaian Dinas Pegawai	2 paket	275.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Pakaian Dinas Pegawai	2 paket	302.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, SKPD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan Masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada SKPD Dinas teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerima usulan-usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan kurang lebih ada 25 usulan, tetapi sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 usulan yang diakomodir, namun bukan berarti 4 usulan tersebut diakomodir sesuai dengan kecamatan yang mengusulkan tetapi akan disebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi/ pelatihan Komputer	3 kelurahan Kecamatan Cidadap	Meningkatnya pemahaman masyarakat di 3 kelurahan sebanyak 15 orang	15.000.000	
2	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi/ pelatihan Komputer	Kiaracandong	Meningkatnya 20 orang di Kelurahan Kebon Jayanti	9.600.000	
3	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi/ Pengadaan jaringan Wifi	Cidadap (Cidadap Girang RW 05 Kelurahan Ledeng)	1 Paket	15.000.000	
3	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi / Pengadaan CCTV	Panyileukan	1 unit di RW 13 Cipadung Kidul	20.000.000	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme

Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30 % dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam mendukung program nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Standar Pelayanan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika SPM KOMINFO Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan Indeks Kinerja Kunci (IKK) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008 Tanggal 2008.

Seiring dengan perubahan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu;

- **Tugas Pokok :**

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.

- **Fungsi :**

- a. Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika;
- b. Pelaksanakan kebijakan lingkup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas**

- b. Sekretaris, membawahkan :**

- 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub.Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program

- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:**

- 1. Seksi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- d. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:**

- 1. Seksi Interkoneksi dan Jaringan;
 - 2. Seksi Manajemen Perangkat Perangak Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Publik.

- e. Bidang Data dan Statistik, membawahkan;**

- 1. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
 - 3. Seksi Publikasi dan Data Terbuka.

- f. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, membawahi;**

- 1. Seksi Pengolahan Aplikasi;
 - 2. Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi;
 - 3. Seksi Integrasi Sistem Informasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- 1. UPT Radio Sonata
 - 2. UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan (Pusmip)

- h. Kelompok Jabatan Fungsional**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sinergitas pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kota Bandung
- Menciptakan kolektivitas pendayagunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika di Kota Bandung
- Mewujudkan artikulasi komunikasi dalam rangka penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan
- Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai, adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang sesuai dengan norma dan standar kualitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Tersedianya prosedur dan tata kerja komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

3.3. Program dan Kegiatan

- I. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
 2. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
 3. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;

4. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
5. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
6. Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center;
7. Kegiatan Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik;
8. Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Kebijakan Pos dan Telekomunikasi;
9. Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi;
10. Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi;
11. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik;
12. Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi.

II. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

III. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Kegiatan Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung
2. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

IV. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran.

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan Peralatan Aparatur
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

VII.Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2017 dan prakiraan maju Tahun 2018, maka dapat di lihat pada Tabel 3.3 di bawah ini;

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Bandung

DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2018		Keterangan
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	-3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				Urusan Pilihan									
	2	10			Komunikasi dan Informatika									
1	2.10	2.10.01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	Tingkat pelayanan publik Berbasis teknologi informasi dan pasif infrastruktur TIK, LAPOR (Laayanan Aspirasi Pengaduan On-Line Rakyat)		100%	23,668,929,418			100%	26,035,822,360	
1	2.10	2.10.01	15	02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aplication Programing Interface (API) dan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan	Kota Bandung	2 Paket	839,108,774	APBD Kota	-	setiap hari	923,019,651	Diskominfo

2	2.10	2.10.01	15	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya komunikasi	Pelayanan komunikasi dan informasi bagi media massa serta media center	Kota Bandung	3 Paket	1,190,184,096	APBD Kota	-	1 paket	1,309,202,506	Diskominfo
3	2.10	2.10.01	15	05	Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi	Maintenance alat-alat studio radio sonata FM dan AM	Kota Bandung	3 Paket	378,985,700	APBD Kota	-	1 paket	416,884,270	Diskominfo
4	2.10	2.10.01	15	06	Kegiatan Perencanaan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Sewa Bandwidth , colocation server Website, Leased Line www.bandung.go.id dan pembangunan Aplikasi SKPD	Kota Bandung	3 Paket	6,516,385,400	APBD Kota	-	3 Paket	7,168,023,940	Diskominfo
5	2.10	2.10.01	15	07	Kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Integrasi aplikasi	Kota Bandung	7 Aplikasi	1,421,244,519	APBD Kota	-	5 Aplikasi	1,563,368,971	Diskominfo
6	2.10	2.10.01	15	09	Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center	Operasional Bandung Command Center dan Onboard GPS	Kota Bandung	3 paket	4,904,068,423	APBD Kota	-	2 paket	5,394,475,265	Diskominfo
7	2.10	2.10.01	15	11	Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik	Operasional Radio Sonata	Kota Bandung	3 paket	1,299,083,600	APBD Kota	-	3 paket	1,428,991,960	Diskominfo
8	2.10	2.10.01	15	12	Kegiatan Pengendalian dan pengembangan kebijakan post dan telekomunikasi	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK	Kota Bandung	2 paket	1,206,663,840	APBD Kota	-	2 paket	1,327,330,224	Diskominfo
9	2.10	2.10.01	15	13	Kegiatan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kota Bandung	2 paket	2,665,824,866	APBD Kota	-	2 paket	2,932,407,353	Diskominfo
10	2.10	2.10.01	15	14	Kegiatan Pengembangan dan Penelitian Perangkat Teknologi Informasi	FDG, Tata Kelola TIK, lokakarya smart city dan star up (perusahaan rintisan)	Kota Bandung	2 paket	359,968,000	APBD Kota	-	2 paket	395,964,800	Diskominfo
11	2.10	2.10.01	15	15	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Utilitas Publik	Pengembangan utilitas publik	Kota Bandung	1 Paket	1,400,467,000	APBD Kota	-	1 Paket	1,540,513,700	Diskominfo

12	2.10	2.10.01	15	16	Kegiatan Perencanaan Teknologi Komunikasi	Tersedianya Perwal data, Tata Kelola TIK, SOP Evaluasi dan pengembangan TIK	Kota Bandung	4 Dokumen	1,486,945,200	APBD Kota	-	4 Dokumen	1,635,639,720	Diskominfo
2	2.10	2.10.01	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelpompok informasi Masyarakat (KIM)		3 Paket	2,315,482,833				2,547,031,116	
13	2.10	2.10.01	17	01	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Internet), PPID dan Open Data di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Kota Bandung	3 paket	2,315,482,833	APBD Kota	-	3 paket	2,547,031,116	Diskominfo
3	2.14	2.10.01	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi			912,668,297				2,749,542,920	
14	2.14	2.10.01	15	11	Kegiatan Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung	Pengembangan portal data	Kota Bandung	5 paket	385,542,500	APBD Kota	-	5 paket	424,096,750	Diskominfo
15	2.14	2.10.01	15	12	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Survei indek kebahagiaan, survai indeks kepuasan, integrasi data, sosialisasi open data dan operasional sistem data base statistik Kota Bandung	Kota Bandung	5 paket	527,125,797	APBD Kota	-	5 paket	579,838,377	Diskominfo

4	4.04	2.10.01	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi			793,458,088					872,803,897	
16	4.04	2.10.01	15	02	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Analisis pembangunan manusia, data basis pembangunan daerah dan pengembangan open data	Kota Bandung	3 paket	793,458,088	APBD Kota	-	3 paket	872,803,897	Diskominfo	
	1	25			Belanja Non Urusan										
5	1.25	1.25.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayahahn Administrasi perkantoran		100%	4,138,183,095			100%	4,552,001,405		
17	2.10	2.10.01	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik dan jasa komunikasi	Kota Bandung	12 bulan	148,346,274	APBD Kota	-	12 bulan	163,180,901	Diskominfo	
18	2.10	2.10.01	01	06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kota Bandung	12 bulan	874,700,000	APBD Kota	-	12 bulan	962,170,000	Diskominfo	
19	2.10	2.10.01	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan Alat tulis kantor	Kota Bandung	12 bulan	324,168,906	APBD Kota	-	12 bulan	356,585,797	Diskominfo	
20	2.10	2.10.01	01	11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dinas	Kota Bandung	12 bulan	264,027,245	APBD Kota	-	12 bulan	290,429,970	Diskominfo	
21	2.10	2.10.01	01	14	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan alat alat Rumah Tangga	Kota Bandung	12 bulan	605,784,770	APBD Kota	-	12 bulan	666,363,247	Diskominfo	
22	2.10	2.10.01	01	15	Kegitana Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran, Majalah dan Tabloid	Kota Bandung	12 bulan	49,152,000	APBD Kota	-	12 bulan	54,067,200	Diskominfo	
23	2.10	2.10.01	01	17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pengadaan Makanan dan Minuman	Kota Bandung	12 bulan	776,196,000	APBD Kota	-	12 bulan	853,815,600	Diskominfo	
24	2.10	2.10.01	01	18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Bandung	12 bulan	809,107,900	APBD Kota	-	12 bulan	890,018,690	Diskominfo	

25	2.10	2.10.01	01	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	12 bulan	286,700,000	APBD Kota	-	12 bulan	315,370,000	Diskominfo
6	2.10	2.10.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1,663,259,699			100%	2,079,585,669	
26	2.10	2.10.01	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan mobil dan Motor Operasional	Kota Bandung			APBD Kota	-	3 unit	250,000,000	Diskominfo
27	2.10	2.10.01	02	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	12 bulan	811,523,240	APBD Kota	-	12 bulan	892,675,564	Diskominfo
28	2.10	2.10.01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Bandung	12 bulan	649,936,459	APBD Kota	-	12 bulan	714,930,105	Diskominfo
29	2.10	2.10.01	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	Kota Bandung	12 bulan	201,800,000	APBD Kota	-	12 bulan	221,980,000	Diskominfo
7	2.10	2.10.01	03		Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tingkat disiplin Aparatur melalui pakaian Dinas		100%	212,750,000				234,025,000	
30	2.10	2.10.01	03	02	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas bagi Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	Kota Bandung	3 Paket	212,750,000	APBD Kota	-	3 Paket	234,025,000	Diskominfo



BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tahun 2017 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari rencana Strategis 2013 – 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana kinerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai (akhir periode renstra 2013 – 2018)

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Diskominfo tidak saja harus mampu menjadi sumber informasi, tetapi juga harus mampu membuat produk-produk teknologi informasi dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang Bermartabat.

Adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, Januari 2017

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung**

Dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198803 2 006